IMPLEMENTASI BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BONGOHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

RISNA I. Y. DAUD
NIM. D02416161

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

IMPLEMENTASI BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BONGOHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

[1]Risna I.Y. Daud, [2]Sri Hantuti Paramata, [3]Rusly Abdurahman Idji

[1)]Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo

[2,3)]Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212

Email: risna.daud@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to get a picture of how the Implementation of Productive Economic Business Assistance (UEP) for Poor Families in Bongohulawa Sub-District, Limboto District, Gorontalo Regency has been carried out in accordance with the Laws and Government Regulations in realizing development based on the aspirations of the community. The research method uses qualitative types. The results showed that the implementation of the UEP assistance program policy in the bongohulawa sub-district of the Limboto sub-district had been running optimally, because the fulfillment of the rights of the beneficiaries was running evenly. Based on the implementation indicators the difference between the implementor's ability to capture and understand the information conveyed is also different. The program manager's resources are professional so that any obstacles encountered can be overcome. The willingness and seriousness of the implementers in implementing program policies is considered to be good. Indicators of economic, social and political improvement can be said to be good.

Keywords: Implementation, Productive Economic Business, Poor Family

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Keluarga Miskin di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan program bantuan UEP di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto telah berjalan secara optimal yang dikarenakan telah terpenuhinya hak-hak pemanfaat berjalan secara merata. Sehingga indikator implementasi perbedaan kemampuan implementor dalam memahami informasi yang disampaikan juga berbeda, namun sumber daya pengelola program sudah professional sehingga kendala apapun yang dihadapi dapat teratasi. Yang didukung oleh kemauan dan kesungguhan dari para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan program dinilai sudah baik dan indikator peningkatan ekonomi, sosial, dan politik sudah dapat dikaan baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Usaha Ekonomi roduktif, Keluarga Miskin*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 4, Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan salah satunya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Agar terwujudnya kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui program pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan merata di segala bidang kehidupan bernegara. Menurut pandangan (Sukrino, 2008:1) menyatakan bahwa kesejahteraaan bagi setiap orang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda untuk faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan. Seseorang dikatakan hidup sejahtera jika orang tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup, baik secara material maupun spiritual. Kebutuhan material yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Sedangkan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, ibadah, keamanan, dihormati dan dihargai orang lain termasuk kebutuhan spiritual. Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan, baik negara berkembang atau negara maju, kemiskinan tetap menjadi suatu masalah pembangunan yang bersifat multidimensi yang hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan terjadi di masyarakat yang ditandai oleh keterbelakangan sumber daya manusia, isolasi perumahan dan bertambahnya tenanga kerja yang tidak memiliki lapangan pekerjaan sehingga terjadi ketidaksetaraan antardaerah, antar sektor dan antar populasi.

Kewajiban untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya merupakan aspek masalah untuk suatu kemiskinan dimana masalah ini sangatlah kompleks. Kemiskinan ini disebabkan oleh dua kondisi dimana "1) Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam, sementara 2) kemiskinan buatan terjadi karena lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin". Sehingga inilah yang dapat menyebabkan pakar ekonomi mengkritik pembangunan yang terlalu fokus terhadap pertumbuhan ketimbang pemerataan. (Zukhri, 2011:1). Seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan miskin/ mengalami kemiskinan yaitu dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Pedomam Umum Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial RI 2011:5).

Kemiskinan adalah masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di bidang apa pun, dengan itu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah "tersedianya data kemiskinan yang akurat dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka". Oleh karena itu, strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang

melaksanakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia adalah program yang harus diprioritaskan oleh kementerian sosial, dengan cara menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan jenis kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).Selain itu ada bentuk program yang dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan dukungan modal ventura untuk memfasilitasi kelompok kurang mampu yang telah ditampung di KUBE untuk mengelola Badan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Untuk penanganan Fakir Miskin, Pemerintah telah menetapkan kebijakan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011. dalam UU tentang Penanganan Kaum Miskin ini adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk pemberdayaan, bantuan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, sehingga KUBE merupakan program unggulan Kementerian Sosial dalam pengentasan kemiskinan. Skema yang diluncurkan untuk meningkatkan dan mengelola keuangan melalui Badan Ekonomi Produktif (UEP). Program berhasil menerima KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga miskin penerima Manfaat UEP. KUBE sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dilakukan dengan strategi penguatan kelompok, memberikan bantuan stimulan bisnis dan bantuan menggunakan dukungan pekerjaan sosial

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32 / HUK / 2016 tentang Penentuan Data Terintegrasi untuk Program Pengurangan Kemiskinan dan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 712 tahun 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo bahwa jumlah rumah tangga dengan cluster “sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin” di Kabupaten Gorontalo sebanyak 44.734 rumah tangga atau sebanyak 192.689 individu. Data kemiskinan yang telah ditentukan adalah dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan/pemberdayaan. Hasil yang diharapkan dengan program ini adalah terselenggaranya bantuan stimulan UEP secara efektif, efisien dan berkelanjutan utamanya kecamatan, desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai tingkat kemiskinan dan terlaksananya kegiatan bantuan stimulan usaha yang sesuai dengan tertib administrasi dan tertib keuangan menurut peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Gorontalo Peraturan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Ekonomi Bisnis Produktif (UEP) Untuk Keluarga Miskin, Program Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dikatakan bahwa Kabupaten Gorontalo dari tahun (2011-2015) menunjukkan stagnasi penurunan angka kemiskinan, bahkan masih tertinggi se Provinsi Gorontalo (Data Badan Pusat Statistik Tahun 2015). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo perlu perhatian serius, karena penduduk dengan tingkat

konsumsi di bawah garis kemiskinan daerah ini 21,05% berada di atas Provinsi Gorontalo 17,41% dan jauh di atas target penurunan proporsi penduduk miskin nasional 10,96%. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan diperlukan sistem yang bersifat kompherensif, dengan adanya sifat kompherensif dapat memastikan bahwa upaya ini akan dapat menyentuh setiap elemen masyarakat miskin.

Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo adalah salah satu daerah sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang melaksanakan program ini tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang disebutkan di atas dan upaya pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang optimal. Dengan hasil pengamatan pendahuluan, objek penelitian menunjukkan bahwa program tersebut masih dilaksanakan dalam menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia profesional dalam mengelola keuangan karena kebanyakan orang berpendidikan sangat rendah, kurangnya pemahaman tentang penerima bantuan modal ventura, kurangnya pengawasan kolaboratif dalam penggunaan modal ventura dari pelaksana program, kurangnya tenaga kerja terampil, dan kurangnya kesadaran publik untuk mengikuti instruksi program pemberdayaan yang disosialisasikan.

Menurut teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horm dalam Agustino (2008: 141-144), terdapat 6 variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan Tujan Kebijakan
   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijkan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersesdia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan, namun bukan hanya itu saja tetapi sumber daya lain juga yang perlu diperhitungkan ialah finansial dan sumber daya waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat penting karena kinrja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakn besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/kecenderung (Disposisis) para Pelaksana
   Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakn yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana
   Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasu, maka asumsinya kesalahn-kesalahan akan sangat jecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
   Hal terakhir yan perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijkan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan ekstenal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Sebagai pertimbangan untuk pemilihan lokasi adalah Kelurahan Bongohulawa adalah salah satu lokasi yang terpilih sebagai penerima bantuan UEP keluarga miskin. Pertimbangan lainnya adalah faktor kedekatan peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat yang menjadi informan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam menggali informasi, mengumpulkan memilih informan, serta memvalidasi data yang akan diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan".

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif. Moleong (2011:38) menjelaskan penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan yang telah berlangsung (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang). berdasarkan penelitian deskriptif hanya menekankan, tidak berhak mengontrol keadaan pada waktu dilakukan

penelitian hanya bisa mengukur apa yang ada. Alasan penggunaan jenis penelitian deskriptif karena peneliti berusaha mengkaji, menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau kondisi implementasi bantuan UEP keluarga miskin di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto.

Sumber data untuk penelitian ini yaitu mereka bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data adalah Kepala Desa, Aparat Desa, dan beberapa tokoh masyarakat serta penerima manfaat Usaha Ekonomi Produktif yang berada di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dilihat dari 6 aspek yaitu berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141-144):

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil wawancara dengan beberapa informasi yang didapatkan mengenai proses pelaksanaan yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana UEP-KM dikelurahan Bongohulawa yaitu informasi dari Dinas Sosial yang memerlukan masyarakat, kemudian diadakan perkumpulan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dana UEP-KM setelah mendapat penjelasan dari Dinas Sosial melalui program sosialisasi. Untuk mendapatkan program UEP ini, masyarakat diwajibkan hadir dalam pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masyarakat, pelatihan ini diadakan guna memberikan keterampilan kepada tiap anggota yang belum mengembangkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki. “Masing-masing kelompok membuat proposal yang akan di ajukan ke Dinas Sosial, dengan persyaratan keterangan surat tidak mampu dari masing-masing kelurahan, Setelah Proposal diusulkan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi, yang selanjutnya diadakan verifikasi lapangan”. Setelah verifikasi kemudian ditentukan penerima bantuan tersebut, sedangkan yang mendapatkan bantuan tiap “kelompok membuka rekening atas nama kelompok masig-masing setelah itu diadakan pencairan dana dari Dinas Sosial ke rekening kelompok masing-masing untuk membeli bahan modal atau alat yang akan di gunakan untuk menjalankan program UEP-KM tersebut atau menyalurkan dana simpan pinjam kepada tiap anggota kelompok”. Dana program UEP-KM diberikan dapat digunakan sesuai dengan program yang diberikan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat Penulis dapat disimpulkan bahwa bantua dana UEP-KM di kelurahan Bongohulawa dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Berbicara tentang implementasi tidak terlepas dari apa yang dilakukan untuk melaksanakan atau memenuhi suatu kewajiban atau kebijakan yang telah dirancang. Implementasi merupakan “sebuah muara dimana terjadi aksi, tindakan maupun aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Karena itu, implementasi bukan hanya aktivitas belaka namun sebuah kegiatan yang sudah direncanakan guna mencapai

tujuan dari kegiatan tersebut". Implementasi program UEP-KM tidak terlepas dari ukuran dan tujuan kebijakan. Berkenaan dengan ini Dunn (2003) menyarankan adanya pilihan kolektif yang saling berhubungan satu sama lain, dimana didalamnya terdapat keputusan untuk melakukan tindakan. Dengan adanya kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat digunakan sebagai kebijakan pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Proses analisis kebijakan publik adalah "serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoringdan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual". Dalam kaitan dengan implementasi program UEP-KM di kelurahan bongohulawa bahwa program dapat diukur dari sejauhmana pemanfaat dapat mengembangkan usaha ekonomi produktifnya sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Merilee S. Grindle dalam Sujianto (2008:35) "implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program. Implementasi kebijakan sangat tergantung atas implementasi program dengan asumsi bahwa program-program kenyataannya secara tepat menjadi tujuan kebijakan. Jadi pada dasarnya implementasi kebijakan sama dengan implementasi program itu sendiri".

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang profesional adalah salah satu kunci suksesnya modernisasi pelaksana program. Sebab mereka menjadi penggerak utama proses pelaksanaan progran di berbagai institusi pemerintah. Sebuah kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan, dalam hal ini Dinas Sosial, pihak kecamatan dan kelurahan telah melaksanakan sejumlah pelatihan bagi unit pengelola program layanan mayarakat untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup keluarga miskin. jika sebuah lembaga/instansi pemerintah ingin menjadi lemaga yang maju dan berkembang pesat hal yang perlu dibenahi ialah sumber daya manusianya, dengan dilakukannya pengelolaan SDM dengan baik sesuai tanggung jawab, jabatan, dan keinginan masyarakat namun hal tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan karena setiap SDM yang dimiliki oleh suatu instansi kemampuannya dalam pengelola program yang dimiliki sbuah instansi tidak lah sama. "Ada pengelola yang memang sejak masuk sudah memiliki kemampuan dan keahlian di atas rata-rata yang mumpuni dan ada juga pengelola yang baru saja menginjakkan kaki di dunia pekerjaan yang nyata sehingga masih membutuhkan banyak waktu untuk belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu memperlakukan setiap

pengelola harus sesuai dengan aturan namun juga jangan menganggap mereka sebagai robot yang bisa disuruh kapan saja tanpa boleh menolak dan tidak bisa mengerti kebutuhan dan keinginannya. Sumber daya manusia adalah hal vital dalam sebuah sistem. Dalam pengelolaan program UEP-KM di kelurahan bongohulawa sesuai hasil wawancara menggambarkan bahwa semua yang terlibat dalam program baik Dinas Sosial, TKSK, Pendamping, pihak kecamatan dan kelurahan sudah memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan program artinya sumber daya manusia sebagai pengelola program sudah profesional. Dalam hal ini kebijakan yang harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Sejalan dengan ini Wahab (2008) menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial".

Pelaksanaan program UEP-KM di Kelurahan Bongohulawa ditangani oleh bidang maupun seksi pada Dinas Sosial dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang profesional dalam bidangnya, serta mempunyai sumber daya sarana dan prasarana yang memadai. Program ekonomi produktif kepada keluarga miskin diawali dengan kegiatan sosialisasi. Keluarga miskin diberikan pengetahuan tentang tujuan dari bantuan UEP-KM. Sosialisasi tersebut dalam bentuk bimtek yang meliputi tata cara mengelola bantuan ekonomi produktif, tata cara pembukuan keuangan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Manusia/SDM sebagai implementor yang berperan penting untuk pengendalian implementasi kebijakan publik. Adapun kartakteristik "agen pelaksana, berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, baik terkait dengan pelaksanaan implementasi, sumberdaya, lingkungan, metoda, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat". Sesuai rekapan rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. "Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Untuk mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan".

Karakteristik agen pelaksana program di kelurahan bongohulawa terdiri dari pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, TKSK, Pendamping, Pemerintah Kelurahan, penerima, dan LSM. Suksesnya program kegiatan ini ditentukan oleh kualifikasi dan kompetensi Sumber daya manusia, akan tetapi jika tidak mengikuti ketentuan umum dan teknis maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan semestinya dengan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai data dan fakta bahwa program kegiatan UEP-KM yang ada di kelurahan Bongohulawa telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan telah ditetapkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana.

Para pelaksana, hal yang perlu dilakukan untuk implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; "(1) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (2) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (3) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut atau disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien". Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan Wahab (2008).

Sikap para pelaksana kegiatan adalah bahwa pada umumnya sesuai ketentuan, artinya pelaksananya sesuai dengan prosedur (perencanaan, pengorganisasian, pelalsanaan, monitoring, dan evaluasi). Bantuan yang diberikan kepada kelurga miskin didasarkan pada hasil identifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan pada tahap awal sehingga sasaran keluarga miskin penerima bantuan UEP-KM sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui proposal bantuan. Pada dasarnya program bantuan UEP-KM merupakan program yang bertujuan untuk merangsang keluarga miskin untuk dapat lebih berusaha demi meningkatkan ekonomi dan taraf hidup keluarga sehingga program ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan program ini masyarakat mengajukan proposal bantuan kepada Bupati dan selanjutnya Bupati memberikan disposisi kepada Dinas Sosial, kepala dinas Sosial memberikan disposisi bidang terkait untuk ditindak lanjuti. Bidang secara teknis melakukan verifikasi awal melalui BDT, setelah yang mengajukan terdaftar dalam BDT bidang melakukan verifikasi di lapangan dan menentukan layak

tidaknya pemohon menerima bantuan atau tidak.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksan

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Yang menjadi kegiatan/aktivitas implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu "dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas". Untuk mengurangi kekacauan/penyimpangan dalam implementasi yang harus dilakukan adalah segala sesuatu tujan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran/tartget group harus diinformasikan. "Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan". Komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan program UEP-KM di kelurahan bongohulawa sudah sesuai prosedur yang ada dimana komunikasi terjadi formal yaitu melalui pertemuan-pertemuan yang telah dijadwalkan dan komunikasi non formal melalui telepon.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sosial, politik dan ekonomi mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan untuk variabel kondisi lingkungan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan dapat mendukung atau menolak, dan bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dampak Program Pemberdayaan UEP-KM di Kelurahan Bongohulawa yang meningkatkan kesejahteraan rakyat/penduduk, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan bahwa implementasi dari program UEP-KM dapat merubah mindset masyarakat tentang bagaimana upaya merubah perekonomian masyarakat melalui bantuan program demi terpenuhinya kebutuhan hidupnya baik secara "fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi,

mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya". Dari hasil wawancara dengan "responden peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pelaksanaan program UEP-KM oleh Dinas Sosial bahwa setelah mendapat keterampilan dalam mengembangkan usaha melalui program oleh Dinas Sosial, masyarakat yang mengikuti program UEP-KM telah memiliki keterampilan, peningkatan pengetahuan, kemandirian dalam berwirausaha, peningkatan kualitas hidup, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan usaha kelompok, dan mengembangkan potensi anggota". Berkaitan dengan itu, paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu program dari Dinas Sosial (UEP-KM) berdampak positif dalam peningkatan kesejahteraan, yakni dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan penghasilan tambahan dimana penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik berupa peningkatan dalam hal pangan serta kesehatan, namun juga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tersebut.

Perkembangan perekonomian pemanfaat bantuan program UEP-KM di kelurahan bonguhulawa sesuai dengan perkembangan ekonomi secara global, sementara untuk hubungan sosial semakin baik seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, dalam hubungan dengan lingkungan politik seringkali polemik terjadi di masyarakat tetapi tidak menimbulkan gejolak sosial. Disampingn itu tanggapan masyarakat di lingkungan/lokasi bantuan UEP-KM kepada keluarga miskin kadang kala menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan UEP-KM merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah kelurahan, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi tentang keluarga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Sementara dari aspek ekonomi keluarga sasaran mengalami pertumbuhan pendapatan, walaupun masih ada kendala-kendala dalam pemasaran, nmun masyarakat merasa juga terbantukan oleh usaha ekonomi yang dikelola oleh keluarga miskin tersebut. Kemudian untuk aspek linkungan politik, memang diakui bahwa bantuan yang diberikan tersebut sering dikaitkan dengan situasi politik yang sementara berlangsung, namun semuah ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan karena yang mendapatkan bantuan didasarkan pada data kemiskinan.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi kebijakan program bantuan UEP-KM di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto telah berjalan secara optimal, karena pemenuhan hak-hak pemanfaat berjalan secara merata. Disamping itu, berdasarkan indikator implementasi masi terdapat beberapa kendala, yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan program banuan UEP-KM belumberjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang

disampaikan juga berbeda. Dari sisi sumber daya pengelola program sudah professional sehinggga apapun kiendala yang dihadapi bisa dapat teratasi. Sedangkan dari sisi disposisi, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan program dinilai sudah baik, dan dari indikator terakhir yaiu peningkatan ekonomi, sosial, dan politik dapat dikatakan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, adapun saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait program UEP-KM, dimana kejelasan informasi harus lebih ditingkatkan dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional melalui pendidikan dan pelatihan, karena program UEP-KM bukan hanya sekedar menghapus KM tetapi harus bisa meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitian yang akan dilakukan dengan memperhatikan program UEP-KM yang akan dilaksanakan sehingga program tersebut berjalan tanpa adanya kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyajarta.

Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Praktek, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Wirawan. 2011. Evaluasi (Model, Standar, Aplikasi dan Profesi) Contoh Aplikasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan dan Buku Teks. Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zukhri, S.Sos. 2011. *Peningkatan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE), Sumatera Barat*

*Keputusan Bupati Go*rontalo Nomor 712 tahun 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Pedomam Umum Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial RI 2011

Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin